

**Journal of International Relations Diponegoro**  
**Volume 10 Issue 2 Year 2025 Page 108-129**

**MAKING THE WORLD MORE FEMINIST?:  
FEMINIST FOREIGN POLICY DALAM MASKULINITAS  
KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL KANADA TAHUN  
2017-2022**

---

*Received: 7th August 2025; Revised: 26th October 2025*

*Accepted: 4th December 2025*

---

**Maharindra Damaringtyas Tunggarani\*, Reni Windiani, Dewi Setiyaningsih**  
**Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,**  
**Universitas Diponegoro**  
**maharindra.dt@gmail.com**

**Abstrak**

Feminist Foreign Policy (FFP) sebagai sistem kebijakan luar negeri yang memprioritaskan perempuan mulai populer diadopsi oleh beberapa negara, salah satunya Kanada. Sebagai bentuk komitmen terhadap FFP, sejak tahun 2017 Kanada telah menjalankan sejumlah kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan wanita dan kesetaraan gender global. Namun, di satu sisi Kanada masih tetap mengeluarkan kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan dan prinsip FFP, salah satunya dalam aspek keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara kebijakan keamanan Kanada pada tahun 2017-2022 dengan tujuan dan nilai-nilai Feminis dalam FFP Kanada. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah data primer dan sekunder. Alat analisis dari penelitian ini adalah Konsep Feminist in International Relation oleh J. Ann. Tickner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi antara kebijakan-kebijakan keamanan Kanada dengan nilai dan prinsip Feminis dalam FFP. Inkonsistensi ini dibuktikan dengan kebijakan berupa penguatan aspek militer pada strategi pertahanan dan keamanan, aliansi yang masih kuat dengan NATO, serta ekspor alutsista ke negara-negara yang melakukan intervensi dan/atau agresi militer ke negara lain, yang tidak sejalan dengan prinsip dan nilai FFP. Inkonsistensi tersebut merupakan hasil dari logika berpikir Realisme yang berbenturan dengan Feminisme, namun sudah terlanjur mengakar terlalu kuat dalam sistem internasional sehingga sulit untuk dieliminasi sepenuhnya.

**Kata kunci :** feminist foreign policy, Kanada, keamanan, paradigma realis

**Abstract**

*Feminist Foreign Policy (FFP), a foreign policy system that prioritizes women, has gained popularity and has been adopted by several countries, including Canada. As part of its commitment to FFP, since 2017, Canada has implemented a range of policies focused on improving women's well-being and promoting global gender equality. However, Canada simultaneously continues to enact policies*

*that are inconsistent with the goals and principles of FFP, notably in the security aspect. This study aims to analyze the alignment between Canada's security policies from 2017 to 2022 and the objectives and values of Feminism within Canada's FFP. The research employs a qualitative method to process primary and secondary data, using J. Ann Tickner's Feminist International Relations concept as its analytical framework. The results indicate that inconsistencies do exist between Canada's security policies and the feminist values and principles of FFP. These inconsistencies are demonstrated by policies such as strengthening the military dimension within defense and security strategies, maintaining strong alliances with NATO, and exporting arms to states that perpetrate military interventions and/or aggression against other countries—all of which conflict with FFP principles and values. These contradictions stem from the clash between Realist logic and Feminist thought, given that Realism remains too deeply entrenched in the international system to be discarded entirely.*

**Keywords:** feminist foreign policy; Canada; security; realist paradigm

## PENGANTAR

Feminist Foreign Policy atau FFP adalah kebijakan luar negeri yang fokus utamanya terletak pada prioritas terhadap kepentingan wanita dan perempuan dalam pembuatan rencana kebijakan, partisipasi diplomasi, pembentukan bantuan dana yang bersumber dari luar negeri, serta menentukan target penerima bantuan sebagai upaya untuk mencapai agenda kesetaraan gender yang terinstitusionalisasi, sekaligus mewujudkan pemberdayaan perempuan dalam aspek diplomasi, perdagangan internasional, serta dalam sektor bantuan dan pertahanan internasional (Bigio & Vogelstien, 2020). Feminist Foreign Policy mengkritik sistem kebijakan luar negeri yang cenderung bersifat tradisional dan male-stream, dimana berjalannya roda sosial-politik suatu negara dalam sistem hubungan internasional tersebut masih terpaku pada realitas konstruksi kaum laki-laki, khususnya pada sektor kekuatan, dominasi militer, dan sektor pertahanan. Fokus implementasi sistem kebijakan yang tradisional inilah yang kemudian berimbang pada perhatian terhadap aspek-aspek lain, seperti kesetaraan gender, yang menjadi dikesampingkan (Youngs, 2004).

Pengimplementasian kebijakan FFP di Kanada sendiri didasari oleh kepercayaan pemerintah pada potensi kaum wanita untuk menjadi agents of change. Berangkat dari alasan tersebut, Pemerintah Kanada kemudian mencanangkan berbagai program unggulan di bawah komando dan pengawasan lembaga Global Affairs Canada (GAC) yang dinilai dapat mendorong efektivitas kebijakan FFP, seperti Feminist International Assistance Policy (FIAP), Feminist Trade Policy, Elsie Initiative, dan beberapa program lain sebagai komitmen dalam mewujudkan agenda Women, Peace, and Security (Global Affairs Canada, 2017).

Program FIAP Kanada bergerak pada bidang bantuan luar negeri dengan fokus utama yang terletak pada dukungan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi wanita dan perempuan untuk menciptakan kesetaraan dan pemberdayaan gender sesuai pada FFP (Global Affairs Canada, 2017). Selanjutnya Feminist Trade Policy sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kanada sebagai hasil dari pengintegrasian FFP pada Free Trade Agreement mewajibkan Kanada untuk menggerakkan mitra dagang mereka dalam rangka menjamin hak seluruh wanita yang terlibat dalam FTA dengan posisi apapun, mulai dari posisi paling bawah hingga atas

dalam tangga hierarkis perusahaan (Foster & Markham, 2024). Kemudian Elsie Initiative for Women in Peace Operations sebagai kebijakan yang berorientasi penuh pada perempuan, dimana kebijakan ini menekankan pentingnya keterlibatan wanita sebagai anggota pemelihara perdamaian atau peacekeeper yang dapat menaikkan efektivitas operasi pencapaian perdamaian atau peace operations itu sendiri (Prime Minister of Canada, 2017).

Agenda-agenda dalam FFP Kanada, secara garis besar, terlihat sangat meyakinkan. Namun, jika meninjau beberapa kebijakan Kanada di bidang keamanan nasional pada tahun 2017-2022, prinsip Feminisme yang diusung oleh Kanada terlihat tidak linear. Misalnya, pada rentang waktu ini tingkat ekspor alutsista Kanada masih sangat tinggi, diikuti dengan anggaran militer dalam strategi pertahanan dan keamanan yang malah semakin meningkat, masih ditambah dengan posisi penting Kanada dalam NATO termasuk segala bentuk kontribusi yang diberikan oleh Kanada kepada organisasi militer terkuat di dunia tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan keamanan Kanada pada tahun 2017-2022 dilihat dari nilai-nilai Feminisme dalam FFP menjadi menarik untuk dipahami dan dikaji lebih dalam.

Untuk menelaah lebih lanjut terkait topik tersebut, penelitian ini menggunakan konsep Feminist in International Relations oleh J. Ann Tickner. Tickner (1992) menyatakan bahwa politik internasional, secara historis, telah lama dinilai sebagai sesuatu yang hanya mahir dilakukan oleh laki-laki. Sehingga, sifat politik internasional yang kita kenal sekarang menjadi male-stream dan male-centred, dimana konsep keamanan nasional maupun global dimaknai hanya sebatas pada bagaimana laki-laki menginterpretasikan ‘keamanan’, yaitu seputar bagaimana suatu negara memiliki kapabilitas untuk mendominasi negara lain sekaligus melindungi diri sendiri dari negara lain melalui jalur militer saja. Dalam argumennya, Tickner percaya bahwa apabila sejak awal politik internasional diimplementasikan dengan lebih inklusif pada pengalaman dan partisipasi wanita, maka perhatian politik internasional terhadap isu-isu yang berdampak langsung pada perempuan pasti akan menjadi lebih tinggi, sehingga keadaan politik internasional di masa modern tidak akan terlanjur se-maskulin sekarang (Tickner, 1992).

Dalam konsep tersebut, Tickner juga turut mengkritik argumen Paradigma Realis dalam memandang keamanan nasional. Tickner mengkritik bahwa pandangan Realis terhadap keamanan nasional mengandung bias gender. Hal tersebut karena argumen Realis terhadap keamanan dibangun hanya melalui konstruksi sosial berdasarkan pengalaman pria, sehingga interpretasi tentang keamanan menjadi tidak objektif dan sama sekali tidak menampung kepentingan wanita. Oleh karena itu, Tickner menyatakan, apabila ingin mencapai sistem dunia dengan kedamaian komprehensif, maka sistem internasional harus mulai merevisi definisi dan prioritas kebijakan keamanan yang memprioritaskan human security. Tidak lagi berpaku pada kekuasaan dan militerisasi dalam state security yang male-centered, dan merubah prioritas tersebut dengan mengakomodasi lebih banyak aspek-aspek yang berhubungan dengan kepentingan wanita, terutama dalam mengeliminasi kekerasan struktural terhadap wanita dengan melakukan peniadaan kekerasan, perang, penggunaan alutsista, dan segala komponen yang berkontribusi pada kekerasan struktural tersebut (Tickner, 1992).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam rangka mencari kebaharuan dan research gap, pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Penelitian pertama adalah literatur karya Laura Parisi dalam jurnal "Foreign Policy Analysis" dengan judul "Canada's New Feminist International Assistance Policy: Business as Usual?" yang mengenai sejauh mana FIAP Kanada mampu berkontribusi nyata dalam perwujudan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan global. Dalam tulisan ini, Parisi melakukan analisis dari sudut pandang perkembangan dan kemajuan ekonomi dalam konteks kemiskinan, kegiatan perdagangan, market citizenship, dan peran sektor privat (Parisi, 2020).

Penelitian kedua merupakan literatur berjudul "Upaya Kanada dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kenya melalui Feminist International Assistance Policy" oleh Nabila Nur Afrida perihal upaya-upaya yang sejauh ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kanada untuk merealisasikan agenda kesetaraan gender di Kenya pada rentang tahun 2018-2019 sebagai bentuk tanggung jawab terhadap FFP melalui penerapan program bantuan luar negeri pada FIAP. Penelitian ini menitikberatkan bahwa perwujudan agenda kesetaraan gender terhambat karena budaya patriarki yang terlanjur melekat pada berbagai lapisan kehidupan di Kenya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah Kanada berinisiatif untuk memberikan sejumlah bantuan luar negeri sekaligus mengintegrasikan pengaruh FIAP di Kenya melalui Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) (Afrida, 2021).

Penelitian ketiga adalah literatur berjudul "Upaya Memulihkan Hak-Hak Perempuan: FIAP Kanada dalam Upaya Penurunan Gender-Based Violence di Afghanistan" oleh Kanya Sephastika Ramadhani dan Marten Hanura dibahas perihal bagaimana Perdana Menteri Justin Trudeau mengimplementasikan program-program dalam FIAP yang tujuan utamanya adalah penurunan angka kemiskinan masyarakat dan penghapusan ketimpangan sosial di Afghanistan dengan dilandaskan pada tingginya tingkat Gender-Based Violence (GBV) dan diskriminasi di negara tersebut. Lebih lengkap, literatur ini juga memaparkan tahapan alokasi pendanaan sekaligus program-program yang diimplementasikan Kanada dalam lingkup FIAP di Afghanistan (Ramadhani & Hanura, 2023).

Penelitian keempat merupakan literatur karya Marie-France Paquet dan Georgina Wainwright-Kemdirim berjudul "Crafting Canada's Gender- Responsive Trade Policy" dibahas tentang 4 elemen utama yang disusun lembaga Global Affairs Canada (GAC) untuk menunjang terciptanya suatu sistem perdagangan yang lebih inklusif dan responsif gender di negara Kanada (Paquet & Wainwright-Kemdirim, 2023).

Penelitian kelima yaitu literatur berjudul "Gender, Peacekeeping, and Child Soldiers: Training and Research in Implementation of the Vancouver Principles" karya Dustin Johnson dan Allyssa Walsh tentang implementasi Vancouver Principles dan Elsie Initiative sebagai dua program utama Kanada sebagai bentuk komitmen terhadap perwujudan agenda Women, Peace, and Security berdasarkan UNSCR 1325.

Kedua literatur ini mengkaji tentang alur dan cara kerja program Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative (Dallaire Initiative) dalam mendukung Vancouver Principle yang dicanangkan Kanada dalam misi pemeliharaan keamanan atau peacekeeping operation (Johnson & Walsh, 2020).

## **METODE RISET**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang proses utamanya bertujuan untuk mengkonstruksi gambaran mengenai fenomena yang diteliti dengan lebih mendalam dan sistematis. Secara operasional, pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Proses ini melibatkan penelusuran dan identifikasi terhadap berbagai sumber sekunder, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada literatur ilmiah (buku dan jurnal), dokumen kebijakan dan laporan resmi pemerintah, data statistik, serta publikasi dari media dan situs web terpercaya. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan kerangka berpikir deduktif. Dalam kerangka berpikir ini, peneliti mengaplikasikan konsep yang telah mapan dalam kajian ilmiah, untuk selanjutnya diterapkan sebagai pisau analisis guna menguji dan memahami data spesifik yang telah terkumpul, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang terperinci dan kontekstual.

## **PEMBAHASAN**

### **Narasi Keamanan Nasional dalam Strategi Pertahanan dan Keamanan Kanada**

Persepsi Kanada dalam memandang keamanan nasional dapat diinterpretasikan melalui serangkaian strategi pertahanan keamanan yang mereka miliki. Strategi tersebut adalah Strong Secure Engaged dan Indo-Pacific Strategy.

#### **1. Strong, Secure, Engaged**

Pada bulan Juni tahun 2017, Kanada memperbarui strategi keamanan mereka dengan kebijakan Strong, Secure, Engaged (SSE). Kebijakan ini akan berfokus pada prioritas pertahanan Kanada selama 20 tahun kedepan, termasuk mempersiapkan anggaran untuk memenuhi prioritas dalam menciptakan sistem yang, diklaim pemerintah Kanada, bersifat inklusif dan gender-responsive (Government of Canada, 2024). Untuk mewujudkannya, SSE memiliki target pengeluaran untuk belanja kapital sebanyak CA\$108 Miliar (CA\$164 Miliar secara tunai), belanja operasional sebesar CA\$283,7 miliar, dan belanja pemeliharaan sebesar CA\$105,4 miliar selama 20 tahun. Kanada juga bekerjasama penuh dengan Amerika Serikat untuk bisa mengimplementasikan strategi ini dengan tepat sasaran (Government of Canada, 2024).

### Data Jumlah Anggaran Militer dalam Strategi SSE Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah (dalam juta)
2017	CA\$ 30,761
2018	CA\$ 29,025
2019	CA\$ 29,949
2020	CA\$ 31,289
2021	CA\$ 31,976
2022	CA\$ 33,707

Sumber: NATO, 2024

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa anggaran militer yang disiapkan pemerintah Kanada dalam Strategi SSE terus meningkat dan mencapai puncaknya di tahun 2022 dengan jumlah kenaikan mencapai 5.4%. Jika melihat dari data anggaran tersebut, perbandingan anggaran yang dialokasikan untuk strategi SSE memiliki kesenjangan yang sangat besar dengan anggaran yang dialokasikan untuk ODA. Misalnya, di tahun 2022 anggaran yang dialokasikan untuk militer mencapai angka CA\$33,707,000,000. Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk ODA hanya sekitar separuh dari jumlah anggaran pertahanan dan keamanan tersebut, yaitu pada angka CA\$16,049,000,000 (Government of Canada, 2023). Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam konteks distribusi anggaran terkait kebijakan luar negeri, Kanada masih memprioritaskan aspek pertahanan dan keamanan demi *state security* daripada anggaran yang berorientasi pada *human security*.

Sejak SSE resmi digunakan, Kementerian Pertahanan Kanada meluncurkan serangkaian program inti sebagai bentuk aktualisasi dari tujuan Strong, Secure, and Engaged (Minister of National Defence Canada, 2018), yaitu: (1) Defence Combat and Support Operation Program, melalui Operasi Nanook, Operasi LIMPID, kolaborasi dengan Amerika Serikat melalui United States through North American Aerospace Defense (NORAD) terkait peringatan kontrol dari luar angkasa, Operasi Martillo, Operasi Artemis, Operasi Passex, dan kontribusi dalam Operational Support Hubs (OSH) untuk menjamin keamanan dan kapabilitas pergerakan infrastruktur vital seperti bandara dan pelabuhan, (2) Defence Services and Contributions to Government, melalui Operasi IMPACT, Operasi UNIFIER, bekerja sama dengan United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), Operasi ELEMENT, dan Operasi LENTUS, (3) Defence Ready Force Element Production, dimana program ini dilakukan dengan menyatukan berbagai elemen pasukan bersenjata untuk memastikan kesiapan mereka dalam operasi militer yang akan dijalankan di masa depan, baik itu untuk Royal Canadian Navy (RCN), Canadian Army (CA), Royal Canadian Air Force (RCAF), maupun Special Operation Forces lain seperti Canadian Special Operations Forces Command (CANSOFCOM), (4) Defence Capability Element Production,

melalui Operasi HONOUR, dan (5) Defence Capability Development and Research, dengan melakukan riset-riset untuk mengembangkan berbagai aspek pertahanan keamanan, seperti teknologi siber dan luar angkasa, teknologi surveillance, terus mendorong inovasi di bidang R&D, dan tetap memperhatikan aspek gender dalam perencanaan pertahanan.

## **2. Indo-Pacific Strategy**

Dalam strategi ini, Kanada memiliki agenda untuk memperkuat posisinya di region Indo-Pasifik, tepatnya di negara-negara yang masuk ke dalam region tersebut seperti Republik Rakyat Cina (RRC), India, dan ASEAN, dengan tujuan khusus untuk mempromosikan perdamaian, ketangguhan dalam menghadapi ancaman, dan keamanan, ekspansi kegiatan perdagangan, investasi, dan ketahanan supply chains, berinvestasi dalam menghubungkan tiap-tiap orang, membangun masa depan yang ‘hijau’ dan berkelanjutan, serta berkomitmen untuk menjadi mitra yang terlibat aktif di region Indo-Pacific (Government of Canada, 2022).

Serangkaian strategi pertahanan keamanan tersebut berhasil menempatkan Kanada pada posisi yang cukup tinggi sebagai salah satu negara dengan kemampuan militer paling mumpuni. Dilansir dari globalfirepower.com, Kanada menempati peringkat ke-28 dari 145 negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Indikator dari penilaian ini didasarkan pada kuantitas unit militer, anggaran, serta kapabilitas logistik dan geografi dari suatu negara. Berdasarkan defense review yang dilakukan oleh situs ini, Kanada juga menempati peringkat yang cukup signifikan pada kategori-kategori yang lebih spesifik, seperti peringkat 29 pada kepemilikan pesawat tempur, peringkat 11 pada kepemilikan pesawat tanker, peringkat 21 pada kepemilikan kendaraan tempur lapis baja, dan peringkat 14 pada kepemilikan kapal selam (2025 Military Strength Ranking, 2025). Artinya, Kanada masih tetap berada di top 20% negara dengan kapabilitas militer tertinggi di dunia meskipun telah mengadopsi sistem FFP.

## **Narasi Keamanan Nasional dalam Aliansi Militer Kanada dengan NATO**

North Atlantic Treaty Organization (NATO) adalah aliansi negara- negara Amerika Utara dan Eropa (NATO, 2025). Sebagai salah satu negara pendiri NATO, Kanada telah banyak berkontribusi pada kemajuan NATO. Namun, jika berfokus pada bagaimana aliansi Kanada dengan NATO setelah Kanada resmi mengadopsi FFP, ditemukan beberapa kebijakan terkait kerjasama militer dan subsidi dana yang diberikan oleh Kanada kepada NATO sebagai anggota NATO.

### **1. Operasi militer**

Beberapa operasi militer yang dilakukan oleh Kanada sebagai bentuk penguatan aliansi dengan NATO adalah Operasi FREQUENCE, yaitu operasi militer yang melibatkan CAF dalam membantu Perancis untuk memindahkan alutsista dan personel militer Perancis dari Negara Perancis ke kawasan Sahel di Afrika. Contoh lainnya adalah Operasi PROJECTION, dimana RCN menyelenggarakan serangkaian latihan bersama dengan angkatan laut dan mitra keamanan internasional Kanada yang lain di tujuh lokasi berbeda di negara dalam kawasan Afrika Barat. Kemudian, salah satu operasi militer sebagai bagian dari NATO adalah Operasi REASSURANCE, dimana Kanada secara rutin mengerahkan personel CAF di

wilayah Eropa Tengah dan Timur sebagai bagian dari langkah-langkah penjamin pertahanan dan keamanan NATO (Minister of National Defence Canada, 2018).

## **2. Alokasi dana**

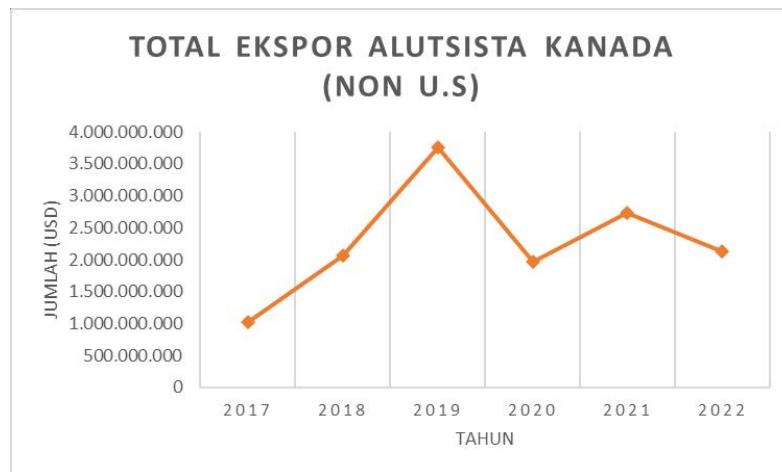
Di tahun 2021-2022, kontribusi Kanada terhadap NATO's Common Funding (Pendanaan Bersama NATO) mencapai 6.8% dari total pendanaan bersama tersebut, yang merupakan hasil dari gabungan dana antara Department of National Defence (DND) yang berkontribusi sebanyak 90%, dan GAC sebanyak 10%. Besaran kontribusi tersebut membawa Kanada pada posisi keenam negara anggota NATO dengan kontribusi pendanaan tertinggi. Dari data tahun 2021-2022, tercatat pendanaan yang diberikan oleh Kanada kepada NATO tersebar pada NATO Military Budget sebanyak CAD 163.3 Juta, NATO Security Investment Program sebanyak CAD 91.4 Juta, dan aktivitas-aktivitas lain NATO seperti NATO Centres of Excellence, pendanaan untuk Markas NATO Rapid Deployable Corps, serta Organisasi Produksi dan Logistik NATO (NPLOs) dengan anggaran mencapai CAD 4.2 Juta (Government of Canada, 2024).

Masih eratnya aliansi dan banyaknya kontribusi yang dilakukan oleh Kanada kepada NATO merupakan bukti bahwa Kanada tidak keberatan untuk tetap mengambil peran penting dalam berbagai operasi militer, sekaligus mendanai lembaga, riset, dan berbagai program yang bertujuan untuk mendorong kemajuan NATO, termasuk operasi-operasi militer yang mereka lancarkan dengan alibi perlindungan pertahanan dan keamanan NATO. Kanada, baik secara langsung maupun tidak, telah mendukung adanya unsur represifitas militer dalam menjaga keamanan, dimana unsur tersebut merupakan bagian dari sistem hegemonic masculinity. Perspektif Kanada tersebut sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai Feminis dalam FFP, dan justru sejalan dengan bagaimana Realis memaknai keamanan.

## **Narasi Keamanan Nasional Kanada dalam Kebijakan Perdagangan Alutsista**

Sejak mengadopsi FFP pada tahun 2017, Kanada telah mengimplementasikan sejumlah program dan kebijakan yang mendukung jalannya sistem FFP di negara tersebut, seperti FIAP, Feminist Trade Policy, dan Elsie Initiative. Meskipun begitu, di saat yang sama Kanada masih menjalankan sejumlah kebijakan luar negeri yang bertolak belakang dengan prinsip FFP. Pada aspek perdagangan, Kanada masih melakukan transaksi berupa ekspor alutsista ke negara-negara yang berkonflik maupun melakukan intervensi militer ke negara lain.

Data Jumlah Ekspor Alutsista Kanada ke Negara Non-US Tahun 2017-2022



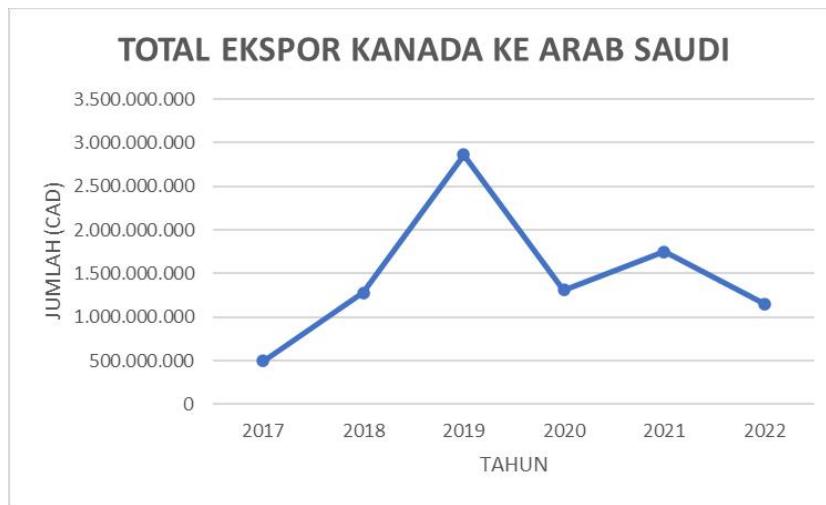
Sumber: Government of Canada

Data tersebut menunjukkan bahwa di tahun yang sama ketika Kanada meresmikan FFP sebagai sistem kebijakan luar negeri mereka, jumlah ekspor alutsista Kanada masih tinggi. Jumlah tersebut bahkan meningkat, hingga puncaknya pada tahun 2019 dengan total penjualan hampir mencapai US\$4 miliar. Angka tersebut kemudian menurun di tahun 2020, dan kemudian stabil hingga tahun 2022. Jika melihat kedua aspek yang telah dianalisis sebelumnya, yaitu strategi pertahanan dan keamanan Kanada, serta bagaimana Kanada masih memiliki aliansi yang erat dengan NATO, kebijakan ekspor alutsista Kanada linear dengan inkonsistensi mereka terhadap FFP. Meletakkan militerisme dan state security diatas human security, banyaknya kontribusi Kanada kepada NATO, kedua hal ini cukup menjadi rambu-rambu bahwa tidak akan mengejutkan jika ketika dianalisis lebih lanjut, ternyata masih terdapat kebijakan lain dalam aspek keamanan yang pada implementasinya turut inkonsisten terhadap FFP, salah satunya adalah ekspor alutsista. Dalam membantu pembuktian terhadap argumen ini, penulis mengambil 2 contoh negara yang merupakan pelanggan tetap ekspor alutsista Kanada, yaitu Arab Saudi dan Israel.

### 1. Studi kasus Arab Saudi

Dari sejumlah negara yang melakukan transaksi pembelian alutsista dengan Kanada tahun 2017-2022, Arab Saudi merupakan salah satu importir teratas.

Data Jumlah Ekspor Alutsista Kanada ke Arab Saudi Tahun 2017-2022



Sumber: Government of Canada

Jika dihitung dari jumlah total ekspor Kanada untuk negara-negara Non-US, maka pada tahun 2017 jumlah impor alutsista yang diterima Arab Saudi mencapai 48.25% dari keseluruhan alutsista yang diekspor Kanada (Government of Canada, 2018), 61.9% di tahun 2018 (Government of Canada, 2019), 76.2% di tahun 2019 (Government of Canada, 2020), 66.6% di tahun 2020 (Government of Canada, 2021), 63.9% di tahun 2021 (Government of Canada, 2022), dan 54.24% di tahun 2022 (Government of Canada, 2023). Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh total alutsista yang diekspor Kanada dikirim ke Arab Saudi.

Kontroversi yang berkaitan dengan penjualan alutsista oleh Kanada ke Arab Saudi dimulai pada tahun 2014, dimana Kanada mengekspor sejumlah alutsista berupa Light Armoured Vehicles (LAV) berjenis LAV 6 sejumlah 928 buah lengkap dengan 13 buah lokakarya untuk tim manajemen alutsista tersebut (Brewster, 2018). Ekspor alutsista tersebut menjadi kontroversi selain karena alutsista tersebut berpotensi digunakan oleh Arab Saudi dalam operasi militer yang melanggar hak asasi manusia, faktor lain yang menjadi kontroversi adalah bagaimana pemerintah Kanada tidak transparan mengenai transaksi alutsista ini, seperti bagaimana PM Kanada pada saat itu menyebut kendaraan yang diekspor sebagai “truk”, sedangkan PM Trudeau menyebutnya sebagai “jeep”, padahal kendaraan tersebut merupakan kendaraan lapis baja siap perang (Brewster, 2018).

Di tahun yang sama, sebuah foto menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendaraan lapis baja yang dibuat oleh perusahaan produsen alutsista di Kanada, General Dynamic Land System (GDLS), digunakan oleh Arab Saudi pada orang-orang Shiite dalam konflik Qatif (Brewster, 2018). Foto tersebut memang tidak dirilis secara resmi, namun cukup menimbulkan kontroversi yang menarik perhatian internasional, dimana Menteri Luar Negeri Kanada saat itu bahkan enggan

mengklarifikasi perihal penggunaan secara langsung persenjataan tersebut (Brewster, 2018).

Pada tahun 2014 Kanada memang belum mengadopsi FFP sebagai sistem kebijakan luar negeri mereka. Meskipun begitu, bahkan setelah Kanada resmi mengadopsi FFP pada tahun 2017 pun, Kanada tidak memberlakukan kebijakan yang berarti dalam menghentikan ekspor persenjataan ke Arab Saudi. Hal ini dapat dilihat melalui bagaimana Kanada melanjutkan ekspor ke Arab Saudi bahkan setelah Konflik Yaman meletus. Setelah mendapat tekanan dari masyarakat, Pemerintah Kanada kemudian melakukan asesmen ulang terhadap kebijakan ekspor mereka ke Arab Saudi. Asesmen tersebut berakhir dengan dirilisnya laporan finalisasi mereka berjudul “Review of export permits to Saudi Arabia (Final Report)” pada bulan April tahun 2020 (Al Jazeera, 2021). Pada laporan tersebut, Kanada menyatakan bahwa tidak ada bukti terkait “resiko substantif” dari ekspor alutsista ke Arab Saudi yang memfasilitasi sebuah “konsekuensi negatif” sesuai dengan bagaimana regulasi terkait ekspor-impor dan perlindungan HAM diatur dalam EIPA (Government of Canada, 2020). Pemerintah Kanada bahkan mengklaim bahwa ekspor alutsista dan teknologi ke Arab Saudi merupakan upaya dukungan Kanada dalam menjaga keamanan regional Arab Saudi, dengan argumen bahwa operasi militer yang dilakukan oleh Kingdom of Saudi Arabia (KSA) merupakan bentuk pertahanan diri atau self defence dari serangan teroris (Government of Canada, 2020). Sehingga, dengan dirilisnya laporan finalisasi tersebut, penangguhan terhadap izin terbit ekspor alutsista ke Arab Saudi dicabut, dan kebijakan ekspor alutsista ke Arab Saudi pun tetap dilanjutkan (Ploughshares, 2021).

Tindakan Kanada dalam menyiapi kritik dan pertanyaan internasional terkait kebijakan ekspor alutsista ke Arab Saudi ini sangat tidak tegas, terutama mempertimbangkan bahwa kontrak yang disetujui bersama Arab Saudi tersebut bukan kontrak yang sepele. Hal ini tentu memperbesar pertanyaan mengenai komitmen Kanada terhadap penegakan hak asasi manusia, apalagi setelah melihat betapa besar dampak negatif yang dirasakan oleh para wanita di Yaman akibat konflik tersebut, seperti Gender Based Violence (GBV) terkait kekerasan seksual (ACAPS, 2023), termasuk kekerasan dan diskriminasi yang membatasi akses terhadap kesehatan, edukasi, hingga hak intelektual para wanita (Banyan Global, 2025).

## **2. Studi kasus Israel**

Selain Arab Saudi, salah satu negara importir alutsista terbesar dari Kanada adalah Israel. Perbedaannya, jika Arab Saudi memiliki jumlah total ekspor terbesar, Israel merupakan negara tujuan dengan izin ekspor yang telah diutilisasi terbanyak dari Kanada.

Data Jumlah Izin Ekspor Alutsista dari Kanada yang Diutilisasi Israel  
Tahun 2017-2022



Sumber: Government of Canada

Dari laporan tersebut, pada tahun 2017 Kanada menerbitkan total 2137 izin, dimana Israel mendapatkan 291 buah dan menempati peringkat kedua setelah United Kingdom (Government of Canada, 2018). Di tahun 2018, dari 2242 izin yang diterbitkan Kanada, terdapat 327 izin yang sudah di utilisasi ditujukan untuk Israel (Government of Canada, 2019). Angka tersebut berada di puncaknya pada tahun 2019 dengan total utilisasi untuk Israel sebanyak 410 dari total 2289 buah (Government of Canada, 2020). Jumlah tersebut sedikit menurun di tahun 2020 dengan total 400 izin ekspor yang telah diutilisasi dari total 2295 buah izin (Government of Canada, 2021). Tahun 2021 merupakan angka utilisasi ekspor terendah bagi Israel, yaitu 280 dari total 2017 buah izin (Government of Canada, 2022), dan kembali naik pada tahun 2022 dengan total 315 izin yang diutilisasi dari total 2985 keseluruhan izin ekspor yang diterbitkan Kanada pada tahun tersebut (Government of Canada, 2023). Jenis persenjataan yang diekspor cukup beragam, seperti perlengkapan elektronik, pesawat luar angkasa militer dan komponennya, bom, torpedo, roket, misil, dan perlengkapan alat peledak lainnya, pesawat terbang, pesawat terbang tanpa awak (UAV), serta alat dan perlengkapan-perlengkapan lain yang didesain atau dimodifikasi untuk kepentingan militer (Bueckert, 2022).

Konflik antara Israel dengan Palestina merupakan salah satu konflik terpanjang dalam sepanjang sejarah dengan kronologi yang sangat kompleks dengan melibatkan berbagai pihak dan aspek. Dampak yang dihasilkan dari konflik yang berkepanjangan tersebut pun sangat masif, terutama bagi kaum marginal, termasuk wanita. Konflik ini berimbang pada kesejahteraan wanita pada berbagai aspek, baik itu ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan fisik dan kejiwaan (Karama Organization, 2018). Namun, dampak mengerikan yang dialami wanita karena konflik ini bukan hal yang mengejutkan. Sifat militerisasi dari okupansi Israel memang sangat maskulin. Karena, okupansi tersebut dibentuk oleh pria, dipimpin pria, dan dipertahankan juga oleh pria. Okupansi Israel ini pada akhirnya melanggengkan ketidaksetaraan gender yang terbentuk karena norma-norma patriarki (Karama Organization, 2018).

Sehubungan dengan kontribusi langsung Kanada terhadap konflik ini, memang tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tentara Israel menggunakan alutsista buatan Kanada untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar HAM kepada warga Palestina. Mempertimbangkan keadaan konflik yang semakin pelik, sulit untuk mengumpulkan rekaman yang secara langsung dan eksplisit membuktikan hal tersebut (Shakil, 2024). Salah seorang pembicara GAC memberikan pernyataan, bahwa “Kebijakan kami mengenai izin ekspor tidak berubah. Kanada memiliki salah satu sistem kontrol ekspor terkuat di dunia, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tercantum dalam undang-undang kontrol ekspor kami.” (Shakil, 2024). Namun, pada prakteknya, kebijakan yang diambil Kanada tidak linear dengan klaim ini. Misalkan alutsista yang dieksport ke Israel bukan merupakan jenis senjata yang berbahaya sekalipun, apabila persenjataan tersebut berkontribusi dalam berlangsungnya konflik Israel-Palestina, maka pemerintah Kanada secara tidak langsung tetap ikut berkontribusi dalam melanggengkan konflik tersebut, termasuk penderitaan wanita di dalamnya.

### **Analisis Konsistensi Kebijakan Keamanan Kanada**

Untuk menganalisis konsistensi kebijakan keamanan Kanada terhadap nilai-nilai Feminis dalam FFP, Peneliti akan menggunakan kerangka pemikiran Feminist in International Relation dari J. Ann. Tickner dan indikator-indikator kebijakan FFP yang ideal oleh UN Women.

#### **1. Konsep Feminist in International Relations**

Dalam konsep Feminist in International Relation, Tickner (1992) menyatakan bahwasanya sistem politik dan hubungan internasional sudah terlalu male-stream dan male-centred karena logika berpikir Realisme yang terlanjur mengakar dan menjadi fondasi dari berjalannya pemerintahan negara dalam sistem internasional. Oleh karena itu, Tickner mengkritik keras Realisme karena logika berpikir yang maskulin di dalamnya menghambat penciptaan sistem internasional yang lebih ramah perempuan. Mengenai bagaimana sistem politik dan hubungan internasional yang male-stream dan male-centred itu, Errol Miller menjelaskan bahwa ketidakseimbangan kekuatan dan pemisahan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki telah terjadi sejak zaman pra-peradaban manusia yang terus berevolusi dan masih terus diadopsi hingga membentuk pola berulang yang, secara langsung maupun tidak, menjadi landasan dalam politik dan hubungan internasional zaman modern ini (Miller, 2001).

Secara konseptual dan historis, patriarki melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Budaya ini dimulai dari awal peradaban manusia yang hidup dalam kelompok-kelompok kecil dengan pengetahuan yang terbatas. Sehingga, sumber daya dan kehidupan berkelompok merupakan satu-satunya cara bagi mereka untuk dapat bertahan hidup. Karena sumber daya yang terbatas, keturunan dan umur panjang merupakan salah satu modal besar bagi kelompok-kelompok tersebut untuk bertahan hidup. Perempuan merupakan pihak yang akan terlibat pada segala proses ‘memberi kehidupan’ mulai dari hamil,

melahirkan, hingga membesarkan anak. Sifat-sifat yang menyertai peran ‘pemberi kehidupan’ seperti kepedulian, empati, kelembutan, keramahan, kebaikan, kerja sama, ketabahan, kesabaran, dan pasif, kemudian dijadikan sebagai definisi dari sifat dasar femininitas (Miller, 2001).

Peran untuk menghadirkan dan memelihara kehidupan ini pun menjadi melekat kepada perempuan, sementara laki-laki diasosiasikan sebagai ‘pengambil kehidupan’. Dalam peran tersebut, laki-laki diekspektasikan untuk mampu melindungi kelompok mereka, termasuk dalam mengeliminasi segala bentuk ancaman terhadap kelompok. Oleh karena itu, sifat-sifat seperti tegas, berani, teguh, tanpa ampun, konfrontasi, penaklukan, dan adanya naluri membunuh menjadi diasosiasikan kepada laki-laki. Sifat-sifat ini kemudian dijadikan sebagai definisi dasar maskulinitas (Miller, 2001). Berjalannya kehidupan dan masyarakat yang turut berevolusi, hak laki-laki dalam keluarga untuk ‘mengambil kehidupan’ dialihkan kepada raja atau kepada suku. Dan dalam masa modern ini kemudian dialihkan kepada negara (Miller, 2001).

Institusi politik modern, utamanya negara, mewarisi peran sebagai ‘pengambil kehidupan’ yang tentu sangat lekat kaitannya dengan kekerasan. Kekerasan ini kemudian dilegitimasi di masa modern yang terwujud dalam sistem militerisme suatu negara. Negara yang menjadikan militer sebagai aspek prioritas mereka artinya menjadikan logika maskulinitas sebagai fondasi dalam membangun negara dan pemerintahannya. (Miller, 2001). Logika ini kemudian akan mendorong mereka untuk membentuk aliansi, yang karena negara memprioritaskan logika maskulin, maka aliansi prioritas mereka akan terletak pada aliansi militer.

Perang sebagai simbol puncak patriarki dan prajurit sebagai simbol tertinggi maskulinitas merupakan hasil dari logika berpikir Realisme. Karena percaya bahwa dunia bersifat anarkis, Realis percaya bahwa setiap negara harus berada dalam mode bertahan hidup dengan mengandalkan kekuatan militer mereka sendiri (*self-help*). Karena prioritas keamanan yang terletak pada ancaman militer, definisi keamanan kemudian ikut menyempit menjadi hanya sebatas pada ancaman keamanan teritorial, bukan keamanan manusia (Miller, 2001). Oleh karena itu, isu-isu human security menjadi tidak diprioritaskan oleh negara lebih dari mereka memprioritaskan state security.

Sifat maskulin dalam logika berpikir Realisme dan segala konsep yang menyertai sifat tersebut pada akhirnya membentuk sistem politik dan hubungan internasional yang berpusat pada laki-laki, termasuk sifat atau personality trait dari laki-laki, peran yang diekspektasikan masyarakat pada laki-laki, serta cara berpikir laki-laki, yang pada akhirnya membentuk sistem politik dan hubungan internasional yang kurang melibatkan pengalaman, sudut pandang, isu, dan kebutuhan perempuan secara general. Oleh karena itulah, Tickner menyebut bahwa sistem politik dan hubungan internasional sudah terlanjur sangat male-stream dan male-centred.

## **2. Indikator Analisis UN Women**

Untuk menganalisis apakah kebijakan keamanan Kanada selaras dengan nilai Feminis dalam FFP, Peneliti akan menggunakan 6 indikator FFP yang ideal dari UN Women (UN Women, 2023).

Indikator (UN Women, 2023)	Kebijakan Keamanan Kanada			Kesimpulan
	SSE & Indo-Pacific Strategy	Aliansi dengan NATO	Ekspor Alutsista	
Bersifat Interseksional	Memusatkan anggaran pada modernisasi persenjataan dan teknologi militer. Hampir tidak ada perhatian ke aspek gender untuk perwujudan <i>gender equality</i>	Aliansi yang masih kuat dengan NATO membuktikan bahwa Kanada masih terus berkontribusi dalam agenda-agenda NATO yang berfokus pada <i>hard security</i> , termasuk militerisme, dan segala kekerasan di dalamnya	Persenjataan yang diekspor Kanada ke Arab Saudi dan Israel bukannya melindungi wanita, namun justru membuat kaum wanita dan anak-anak menjadi pihak yang paling terdampak dan dirugikan	Tidak memenuhi indikator
Bersifat Transformatif dan Sistemik	Justru melanggengkan militerisme internasional, bukan mengkampanyekan <i>human security</i>	Aliansi yang masih kuat dengan NATO artinya Kanada ikut melanggengkan sistem militer yang maskulin	Ekspor alutsista ke negara-negara yang melakukan intervensi atau agresi militer artinya Kanada berkontribusi dalam melanggengkan perang dan tindakan pelanggaran HAM	Tidak memenuhi indikator
Memiliki Koherensi dengan Kebijakan	Anggaran militer justru ditingkatkan dan lebih tinggi	Area pergerakan NATO yang sangat berbasis	Ekspor alutsista justru melanggengkan pelanggaran	Tidak memenuhi indikator

Lainnya	dari anggaran berbasis <i>human security</i>	militer dan <i>hard security</i> tidak linear dengan FFP yang berbasis <i>human security</i>	HAM dan maskulinitas dalam perang	
Mendukung Partisipasi dan Inklusivitas	Melibatkan wanita dalam merumuskan kebijakan, yaitu Anita Anand sebagai Menteri Pertahanan untuk tahun 2021-2023 (Member of Parliament for Oakville East, 2025). Namun kebijakan yang dihasilkan tetap belum linear dengan FFP	Melantik Wakil Sekretaris Jenderal wanita bernama Rose Gottemoeller tahun 2016-2019 (NATO, 2019). Namun agenda-agenda NATO masih tetap berbasis <i>hard-security</i>	Melantik Chrystia Freeland sebagai Menteri Luar Negeri untuk tahun 2017-2019. Namun, kebijakan Kanada dalam pengawasan GAC dan Kementerian Luar Negeri nyatanya tetap belum linear dengan FFP	Tidak memenuhi indikator, karena partisipasi dan inklusivitas belum bersifat substantif, masih sekedar simbolis
Terdapat Akuntabilitas dan Transparansi	Belum ada program yang secara spesifik mendukung agenda <i>gender equality</i> atau <i>human security</i> dalam dokumen resmi SSE (Government of Canada, 2024) dan Indo-Pacific Strategy (Government of Canada, 2022)	Program untuk agenda <i>gender equality</i> atau <i>human security</i> dalam laporan resmi NATO masih belum lebih diprioritaskan daripada program untuk agenda berbasis keamanan dan <i>hard security</i> (NATO, 2023)	Pemerintah Kanada tidak transparan mengenai berbagai hal, seperti kontrak dan senjata apa yang dieksport ke Arab Saudi (Hashem & Strickland, 2017) dan Israel (Kestler-D'Amours, 2024) serta tidak memonitor potensi penyalahgunaan alutsista yang mereka ekspor	Tidak memenuhi indikator
Lepas dari pengaruh Post-Colonial	Strategi SSE dan Indo-Pacific	Dengan beraliansi dengan	Tidak hanya karena profit, motivasi	Tidak memenuhi indikator

---

melanggengkan persaingan <i>deterrence</i> dalam sistem militer sebagai warisan kolonial Blok Barat melawan Blok Timur	NATO, Kanada justru melanggengka n eksistensi NATO sebagai organisasi berbasis militär warisan Perang Dingin dari Blok Barat	Kanada melakukan ekspor alutsista ke Arab Saudi karena ingin mempertahanka n status quo yang merupakan warisan <i>Post-</i> <i>Colonial</i>
---	--	--

---

Dari analisis menggunakan indikator-indikator dari UN Women tersebut, terbukti bahwa kebijakan keamanan Kanada tidak bisa disebut sebagai kebijakan yang ideal untuk mencapai agenda-agenda feminis dalam FFP. Ketika hasil analisis tersebut diterjemahkan melalui kerangka pemikiran Tickner, alasan utama mengapa pemerintah Kanada gagal memenuhi indikator untuk suatu kebijakan dikatakan ideal dengan FFP adalah karena logika berpikir pemerintah Kanada yang masih kental dengan Realisme, termasuk kekerasan, kompetisi, dan segala konsep yang muncul akibat maskulinitas dalam logika berpikir paradigma tersebut. Karena prioritas keamanan Realisme bertolak belakang dengan tujuan dan prioritas keamanan Feminis, prioritas pada kebijakan keamanan yang diluncurkan oleh Kanada pun akhirnya tidak bisa secara komprehensif mengakomodasi kebutuhan sekaligus melindungi hak-hak perempuan sesuai dengan cita-cita Feminis dalam FFP. Sehingga, ketika secara normatif pemerintah Kanada seharusnya melandaskan prinsip dan nilai Feminis dalam menyusun kebijakan, pada praktiknya hal tersebut sulit dilakukan karena berbenturan dengan prinsip Realisme yang, tidak dipungkiri, memang sudah terlanjur mengakar dalam sistem politik dan hubungan internasional. Sehingga, pada akhirnya kebijakan keamanan yang diluncurkan pemerintah Kanada tetap tidak bisa lepas dari pengaruh Realisme, dimana hal tersebut berpengaruh pada output dari kebijakan-kebijakan tersebut yang belum bisa berkontribusi dengan maksimal dalam mewujudkan agenda-agenda yang women-oriented sesuai dengan cita-cita Feminis dalam FFP.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa logika berpikir Kanada dalam menyusun kebijakan keamanan masih sangat kental dengan Realisme dan maskulinitas di dalamnya, sehingga mempengaruhi konsistensi kebijakan keamanan tersebut dengan prinsip, nilai, dan prioritas Feminis dalam FFP menjadi inkonsisten. Analisis ini dibuktikan melalui 3 temuan utama, yaitu strategi pertahanan dan keamanan Kanada yang masih sangat berbasis militer, kebijakan ekspor alutsista yang justru melanggengkan perang, serta bagaimana Kanada justru memperkuat persekutuan mereka dengan NATO yang merupakan salah satu organisasi keamanan berbasis militer terkuat di dunia. Temuan-temuan ini menjadi bukti bahwa Kanada

masih meletakkan state security diatas human security, dimana hal tersebut bertentangan dengan cara pandang Feminis yang meletakkan konsep human security diatas state security, dan justru linear dengan cara pandang Realis yang malah dikritik keras oleh Feminis, terutama perihal mindset dalam konsep keamanan.

Studi kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dunia internasional sudah terlalu kental dengan Realisme, lengkap dengan maskulinitas yang terlanjur mengakar begitu dalam. Sehingga, negara yang sudah berinisiatif untuk menciptakan dunia yang lebih ramah perempuan pun tetap kesulitan untuk mengimplementasikan programnya dengan seratus persen berhaluan pada prinsip Feminisme dan sepenuhnya lepas dari logika berpikir Realisme. Meskipun Kanada sudah secara sukarela bergabung menjadi salah satu dari segelintir negara yang berani menggunakan FFP sebagai sistem kebijakan luar negeri mereka, sekaligus menunjukkan komitmen mereka terhadap FFP melalui program-program yang berorientasi pada pemberdayaan wanita, seperti FIAP, Feminist Trade Policy, dan Elsie Initiative, nyatanya implementasi terhadap program-program tersebut tetap tidak mampu bergerak secara totalitas dan konsisten sesuai dengan nilai-nilai Feminisme. Dalam berjalannya kebijakan tersebut, Kanada, secara langsung maupun tidak, dan secara sadar maupun tidak, tetap memberikan sumbangsih dalam kelanggengan sistem internasional yang berdasarkan pada maskulinitas dan anarkisme. Tidak menutup kemungkinan bahwa kesulitan serupa juga dialami oleh negara-negara lain yang sedang atau hendak mengadopsi FFP sebagai sistem kebijakan luar negeri mereka. Oleh karena itu, hal ini membuktikan betapa mengakarnya Paradigma Realisme dalam sistem internasional, hingga bahkan ketika Kaum Feminis tidak henti-hentinya mengkampanyekan pemberdayaan wanita dan kesetaraan gender global, agenda-agenda tersebut tetap sulit tercapai secara komprehensif.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Artikel jurnal ini dihasilkan atas bantuan dan dukungan dari orang tua, teman-teman, serta dosen-dosen terkasih sehingga artikel dapat diselesaikan. Tanpa bantuan dari mereka, penulis tidak akan berhasil menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Penulis berharap artikel ini dapat berguna untuk penelitian lain di kemudian hari dan juga untuk masyarakat. Konten dan isi dalam artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## **REFERENSI**

(Artikel Jurnal)

- Bigio, J., & Vogelstein, R. (2020, June). Understanding Gender Equality in Foreign Policy: What the United States Can Do. Council on Foreign Relations. Retrieved March 20, 2024, from [https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report\\_pdf/discussion-paper\\_bigio-and-vogelstein\\_gender-equality\\_or\\_0.pdf](https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/discussion-paper_bigio-and-vogelstein_gender-equality_or_0.pdf)
- Johnson, D., & Walsh, A. (2020). Gender, Peacekeeping, and Child Soldiers: Training and Research in Implementation of the Vancouver Principles. Allons-y Journal of Children Peace and Security, 4, 51.

- Paquet, M.-F., & Wainwright-Kemdirim, G. (2023). Crafting Canada's Gender-Responsive Trade Policy. *Trade Policy and Gender Equality*, 311.
- Parisi, L. (2020). Canada's New Feminist International Assistance Policy: Business as Usual? *Foreign Policy Analysis*, 163.10.1093/fpa/orz027
- Ramadhani, K. S., & Hanura, M. (2023). Upaya Memulihkan Hak-Hak Perempuan: FIAP Kanada dalam Upaya Penurunan Gender-Based Violence di Afghanistan. *Journal of International Relations*, 9(2), 112.
- Youngs, G. (2004, January). Feminist International Relations: A Contradiction in Terms? Or: Why Women and Gender Are Essential to Understanding the World 'We' Live in. *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-), 80(1), 87. <https://www.jstor.org/stable/3569295>

(Skripsi)

- Afrida, N. N. (2021). Upaya Kanada dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kenya melalui Feminist International Assistance Policy. 1. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60476/1/NABI LA%20NUR%20AFRIDA.FISIP.pdf>

(Buku)

- Foster, S., & Markham, S. A. (2024). Feminist Foreign Policy in Practice. In *Feminist Foreign Policy in Theory and in Practice: An Introduction* (1st ed., pp. 80-108). Routledge, Taylor & Francis Group. 10.4324/9781003295617-4
- Miller, E. (2001). *Gender, Peace and Conflict* (I. Skjelsboek & D. Smith, Eds.). SAGE Publications.
- Tickner, J. A. (1992). *Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security*. Columbia University Press. 10.2307/2080425
- Tickner, J. A. (2001). *Gendering World Politics: Issues and Approaches in the Post-Cold War Era* (1st ed.). Columbia University Press.
- Government of Canada. (2022). *Canada's Indo-Pacific Strategy*. Government of Canada= Gouvernement du Canada.

(Dokumen Resmi)

- Global Affairs Canada. (2017). *Canada's Feminist International Assistance Policy*. vii-1.[https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/iap2-eng.pdf?\\_ga=2.264804943.1779482672.1710949608-2107874108.1709294000](https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/iap2-eng.pdf?_ga=2.264804943.1779482672.1710949608-2107874108.1709294000)
- Government of Canada. (2018). *2017 Export of Military Goods*. Global Affairs Canada. Retrieved June 2, 2025, from <https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/assets/pdfs/controls-controles/reports-rapports/mer-2017-eng.pdf>
- Government of Canada. (2019). *2018 Export of Military Goods*. Global Affairs Canada. Retrieved June 2, 2025, from <https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/>

transparence/assets/pdfs/controls-controles/reports-rapports/military\_goods-2018-marchandises\_militaires-eng.pdf

Government of Canada. (2020). 2019 Export of Military Goods. Global Affairs Canada. Retrieved June 2, 2025, from  
[https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/assets/pdfs/controls-controles/reports-rapports/military\\_goods-2019-marchandises\\_militaires-eng.pdf](https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/assets/pdfs/controls-controles/reports-rapports/military_goods-2019-marchandises_militaires-eng.pdf)

Government of Canada. (2021). 2020 Export of Military Goods. Global Affairs Canada. Retrieved June 2, 2025, from  
[https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/assets/pdfs/controls-controles/reports-rapports/military\\_goods-2020-marchandises\\_militaires-en.pdf](https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/assets/pdfs/controls-controles/reports-rapports/military_goods-2020-marchandises_militaires-en.pdf)

Government of Canada. (2022). 2021 Export of Military Goods. Global Affairs Canada. Retrieved June 2, 2025, from  
[https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/assets/pdfs/controls-controles/reports-rapports/military\\_goods-2021-marchandises\\_militaires-en.pdf](https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/assets/pdfs/controls-controles/reports-rapports/military_goods-2021-marchandises_militaires-en.pdf)

Government of Canada. (2023). 2022 Export of Military Goods. Global Affairs Canada. Retrieved June 2, 2025, from  
[https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/assets/pdfs/controls-controles/reports-rapports/military\\_goods-2022-marchandises\\_militaires\\_eng.pdf](https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/assets/pdfs/controls-controles/reports-rapports/military_goods-2022-marchandises_militaires_eng.pdf)

#### (Laporan)

ACAPS. (2023, November 23). Yemen: Understanding the Cycle of Gender- Based Violence. ACAPS Analysis Hub: Thematic Report, 4.  
[https://www.acaps.org/fileadmin/Data\\_Product/Main\\_media/20231123\\_ACAPS\\_Yemen\\_analysis\\_hub\\_understanding\\_the\\_cycle\\_of\\_gender-based\\_violence.pdf](https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Main_media/20231123_ACAPS_Yemen_analysis_hub_understanding_the_cycle_of_gender-based_violence.pdf)

Banyan Global. (2025, January 30). USAID/Yemen Gender Analysis 2020. 17-20.  
<https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/03/GITA-II-USAID-Yemen-Gender-Analysis-30-January-2020-DEC-version-No-Track-Changes-1.pdf>

Bueckert, M. (2022, April). Arming Apartheid: Canada's Arms Exports to Israel. Canadian for Justice and Peace in the Middle East. Retrieved June 9, 2025, from  
[https://assets.nationbuilder.com/cjpme/pages/6073/attachments/original/16496945/Final\\_-\\_Arming\\_Apartheid\\_-\\_CJPME\\_-\\_2022-04-13.pdf?1649696945=&utm](https://assets.nationbuilder.com/cjpme/pages/6073/attachments/original/16496945/Final_-_Arming_Apartheid_-_CJPME_-_2022-04-13.pdf?1649696945=&utm)

Karama Organization. (2018, November 20). #PalestinianWomen: The Disproportionate Impact of The Israeli Occupation. Retrieved June 9, 2025, from <https://www.el-karama.org/longform/palestinianwomen-the-disproportionate-impact-of-the-israeli-occupation>

NATO. (2023). The Secretary General's Annual Report. Retrieved June 30, 2025, from [https://www.nato.int/content/dam/nato/legacy-wcm/media\\_pdf/2023/3/pdf/sgar22-en.pdf](https://www.nato.int/content/dam/nato/legacy-wcm/media_pdf/2023/3/pdf/sgar22-en.pdf)

- NATO. (2024, June 12). Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2024). 7.  
[https://www.nato.int/nato\\_static\\_fl2014/assets/pdf/2024/6/pdf/240617-def-exp-2024-en.pdf](https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2024/6/pdf/240617-def-exp-2024-en.pdf)
- Government of Canada. (2020, April 16). Final report: Review of export permits to Saudi Arabia. Retrieved June 3, 2025, from  
<https://www.international.gc.ca/trade-commerce/controls-controles/memo/annex-a-ksa.aspx?lang=eng>
- Government of Canada. (2023). Statistical Report on International Assistance: Fiscal Year 2021-2022. Retrieved August 14, 2025, from  
<https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/international-assistance-report-stat-rapport-aide-internationale/2021-2022.aspx?lang=eng>
- Government of Canada. (2024, April 8). Funding. Canada.ca. Retrieved June 28, 2025, from <https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/reports-publications/proactive-disclosure/nddn-supplementary-estimates-b-2023-2024/supplementary-estimates-b-funding.html#toc8>
- Minister of National Defence Canada. (2018). Department of National Defence and The Canadian Armed Forces 2017-2018 Departmental Results Report. Retrieved June 15, 2025, from  
<https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/reports-publications/departmental-results-report/departmental-results-2017-18-index.html>
- Ploughshares. (2021, August 11). SPECIAL REPORT: "No Credible Evidence" - Canada's flawed analysis of arms exports to Saudi Arabia. Project Ploughshares. Retrieved June 3, 2025, from  
<https://ploughshares.ca/special-report-no-credible-evidence-canadas-flawed-analysis-of-arms-exports-to-saudi-arabia/>
- UN Women. (2023). GENDER RESPONSIVE APPROACHES TO FOREIGN POLICY AND THE 2030 AGENDA: FeminisT FOREIGN POLICIES. UN Women: In Brief. Retrieved June 4, 2024, from  
<https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-09/gender-responsive-approaches-to-foreign-policy-and-the-2030-agenda-Feminist-foreign-policies-en.pdf>

(Situs Internet)

- Al Jazeera. (2021, August 11). Canada violating int'l law by selling arms to Saudis: Report. Retrieved June 3, 2025, from  
<https://www.aljazeera.com/news/2021/8/11/canada-violating-intl-law-by-selling-arms-to-saudis-report#:~:text=Khashoggi%2C%20a%20Washington%20Post%20columnist,total%20non%2DUS%20arms%20exports.>
- Al Jazeera, Hashem, M., & Strickland, P. (2017). Uncertainty shrouds Canadian arms sales to Saudi Arabia. Retrieved June 20, 2025, from  
<https://www.aljazeera.com/news/2017/12/11/uncertainty-shrouds-canadian-arms-sales-to-saudi-arabia>
- Al Jazeera & Kestler-D'Amours, J. (2024). How Canada's 'off-the-record' arms exports end up in Israel. Retrieved June 30, 2025, from

<https://www.aljazeera.com/news/2024/8/15/how-canadas-off-the-record-arms-exports-end-up-in-israel>

Brewster, M. (2018, March 20). Canada's arms deal with Saudi Arabia includes 'heavy assault' vehicles. CBC. Retrieved June 3, 2025, from <https://www.cbc.ca/news/politics/canada-saudi-arms-deal-1.4579772>

Member of Parliament for Oakville East. (2025). Meet Anita Anand. Anita Anand: Member of Parliament for Oakville East. Retrieved September 30, 2025, from <https://www.mpanitaanand.ca/aboutanitaanand>

Prime Minister of Canada. (2017, November 15). The Elsie Initiative for Women in Peace Operations. Prime Minister of Canada: Justin Trudeau. Retrieved June 4, 2023, from <https://www.pm.gc.ca/en/news/backgrounders/2017/11/15/elsie-initiative-women-peace-operations>

Government of Canada. (2024, January 11). Defence Investment Plan 2018 | Strong, Secure, Engaged: Canada's Defence Policy. Canada.ca. Retrieved June 22, 2025, from <https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/reports-publications/defence-investment-plan-2018/sse.html>

NATO. (2019). Rose Gottemoeller Deputy Secretary General. Retrieved June 27, 2025, from <https://www.nato.int/en/about-us/organization/who-we-are/nato-deputy-secretaries-general/rose-gottemoeller>

NATO. (2025). What is NATO? NATO. Retrieved June 27, 2025, from [Shakil, I. \(2024, March 6\). Pro-Palestinian lawyers sue Canada over military exports to Israel. The Arab Weekly. Retrieved June 9, 2025, from <https://theiarabweekly.com/pro-palestinian-lawyers-sue-canada-over-military-exports-israel#:~:text=%E2%80%9COur%20policy%20on%20export%20permits,sustained%20ceasefire%20in%20the%20conflict.>](https://www.nato.int/nato>Welcome/</a></p></div><div data-bbox=)

2025 Military Strength Ranking. (2025). Global Firepower. Retrieved August 4, 2025, from <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>